

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran dalam efektivitas pengelolaan suatu wilayah. Daerah mempunyai hak otonom untuk pengelolaan daerahnya sendiri, hak tersebut diatur didalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan No. 33 tahun 2008 mengenai hak setiap daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat. Hak otonom diberikan kepada daerah dengan tujuan kemandirian dan keleluasaan daerah dalam membangun serta meningkatkan potensinya sendiri.

Dalam pembangunan suatu daerah tentunya sangat penting untuk mengetahui rancangan seperti apa yang dilakukan pemerintah dalam pengaturan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya. Anggaran menjadi sangat penting dalam merealisasikan kebijakan atau rancangan pemerintah untuk kemajuan daerah. Dalam hal ini anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi bentuk rancangan anggaran tahunan oleh pemerintah daerah melalui persetujuan dan penetapan dari DPRD yang menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran suatu daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berperan penting sebagai landasan dalam pengawasan dan pemeriksaan anggaran daerah. Realisasi dalam pelaksanaan APBD seringkali tidak wajar dimana masih banyaknya pengelolaan anggaran pada beberapa wilayah di Indonesia rata-rata mempunyai kendala yang sama, diantaranya adalah masih banyaknya daerah yang terlambat menetapkan APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), struktur APBD yang kurang ideal dan penyerapan belanja yang relatif lambat (Arfan et al., 2016).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi patron besar dalam melihat sejauh mana perkembangan suatu daerah selama beberapa periode tertentu. APBD sendiri dirancang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan urgensi pembangunan daerah. Sejauh ini alokasi dana APBD belum mampu berperan besar dalam peningkatan ekonomi dikarenakan lebih berfokus dalam APBD bukan hanya mengenai pertumbuhan ekonomi tapi banyak hal lainnya seperti pendidikan, sosial, dan politik. Namun, tujuan dari semua itu tetap bermuara pada peningkatan perekonomian. Bantuan dana melalui APBD oleh pemerintah pusat kepada daerah sering kali membuat daerah tersebut tidak mandiri secara finansial karena ada bentuk ketergantungan dana yang belum dapat dihilangkan di daerah tersebut yang salah satunya

adalah Nusa Tenggara Barat.

Provinsi NTB berada di Pulau Nusa Tenggara Indonesia yang jumlah penduduknya sebanyak 5,47 juta jiwa. Wilayah ini terdiri dari 10 Kota/Kabupaten dan terpisah menjadi 2 pulau besar yakni Lombok dan Sumbawa. Provinsi NTB memiliki potensi alam dan sumber daya yang melimpah diantaranya, wisata alam yang bagus, pertanian yang melimpah, laut yang membentang luas, dan pertambangan yang hingga saat ini masih dikeruk hasilnya. Namun dilain sisi realitas lingkungan berbanding terbalik dengan pendapatan alam yang ada di NTB, permasalahan mengenai pendapatan daerah yang minim berdampak besar terhadap kualitas pendidikan, pendapatan rata-rata penduduk, minimnya lowongan kerja dan tenaga yang ahli dalam bidangnya, serta infrastruktur yang masih kurang baik dalam segi pendidikan, kesehatan, maupun sosial.

Sebagai Provinsi dalam kategori tempat wisata dengan sumber daya alam yang bagus NTB selayaknya mampu meningkatkan persaingan dan pendapatan melalui sektor-sektor unggulan yang dimiliki. Upaya pemerintah dengan pemberian subsidi, peminjaman dan penyaluran dana untuk peningkatan kualitas wisata di NTB nyatanya belum mampu efektif secara menyeluruh karena timbul masalah sumber daya manusia yang belum mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi yang telah berkembang (Murapi et al., 2022).

Menurut data Badan Pusat Statistik, perkembangan pertumbuhan ekonomi di NTB sudah semakin baik dilihat dari hasil PDRB tiap tahunnya mengalami peningkatan tahun 2017 sebesar Rp.94.608.209,35, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp.90.349.129,08, tahun 2019 naik menjadi Rp.93.872.438,65, tahun 2020 masih berada diangka konstan sebesar Rp.93.288.873,64, tahun 2021 meningkat sebesar Rp.95.437.855,96, dan tahun 2022 meningkat pesat sebesar Rp.102.074.074,21. Dari data tersebut mengindikasikan semakin meningkat pertumbuhan ekonomi di NTB. Namun, realitas dari implementasi lapangan masih belum mampu membawa Provinsi NTB sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus.

Dalam penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa hambatan pendapatan PAD di NTB terjadi karena 2 faktor yakni internal dan eksternal, dimana faktor internal berasal dari kurang faham dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak, faktor eksternalnya ialah perkembangan teknologi yang belum mampu diterapkan (Mutihawadi & Arisdityoto, 2023).

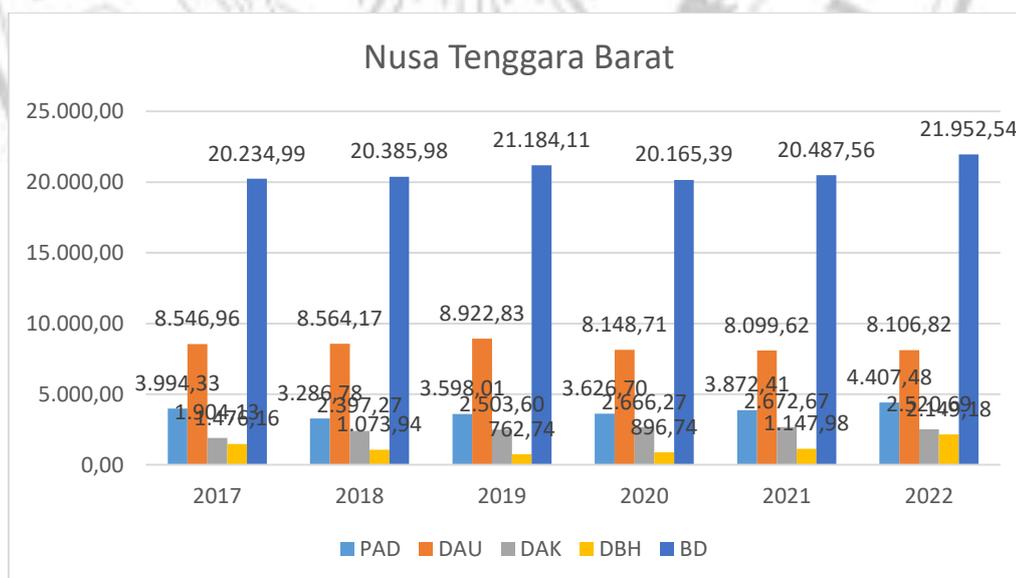
Dalam pelaksanaan otonom daerah Provinsi NTB belum mampu mandiri secara ekonomi dimana sebagian besar kota/kabupaten masih bergantung pada transfer pemerintah

pusat. Salah satunya ialah tingkat desentralisasi fiskal di Kota Mataram masuk dalam kategori kurang dan menunjukkan bahwa dalam anggaran masih sangat bergantung pada penerimaan pusat maupun provinsi seperti dari dana hibah, dana bagi hasil, dana perimbangan, dana bantuan keuangan provinsi (Alwi et al., 2020).

Menurut penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa kebijakan fiskal pemerintah melalui APBD belum mampu menggerakkan perekonomian di Kabupaten Sumbawa, hal ini dilihat dari melemahnya sektor pertanian, perdagangan hotel dan restoran, industri pengolahan dan sektor pariwisata lainnya (Fitriyani et al., 2020).

Realitas kondisi lingkungan dan perekonomian Provinsi NTB tahun 2017-2022 menurut data realisasi keuangan dapat dikatakan membaik jika dilihat dari beberapa tahun-tahun kebelakang. Meskipun tahun 2017-2022 terbilang baik, masih banyak realisasi lapangan menunjukkan masih kurangnya efektivitas alokasi pendanaan di NTB dalam pemenuhan pelayanan publik. Dari hasil beberapa penelitian menunjukkan kemandirian keuangan Lombok Tengah salah satunya pada tahun 2019-2021 masih dalam kategori kurang mandiri karena berada di 12,152% yang artinya pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya (Rini & Suguharti, 2016).

Adapun realisasi anggaran di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017-2022 sebagai berikut:



Sumber: Djpk Kemenkeu

Gambar 1. Realisasi PAD, DAU, DAK, DBH dan BD NTB.

Melihat dari tabel diatas, realisasi APBD dilihat dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja daerah di Nusa Tenggara Barat selama tahun 2017-2022 mengalami angka yang fluktuatif. Secara umum realisasi APBD dari 5 sektor diatas mengalami penurunan pada tahun 2018 dikarenakan terjadinya bencana alam gempa bumi dalam jangka panjang yang berdampak pada perekonomian dan pendistribusian alokasi dana daerah yang berfokus pada penyelesaian bencana. Selanjutnya untuk DAK dan BD. Selanjutnya, APBD mulai mengalami pemulihan dan peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 setelah pemulihan dari bencana alam dan Covid-19 yang berdampak pada semua sektor APBD di Nusa Tenggara Barat.

Mengacu pada permasalahan yang kian berlarut-larut dimana pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas yang mumpuni untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Tiap tahun APBD di NTB mengalami kenaikan yang artinya keseriusan pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan di NTB sudah serius, namun belum mampu dicapai oleh pemerintah daerah. Melihat dari APBD yang masih belum optimal pengolahannya sehingga perlunya diketahui sejauh mana APBD di limpahkan untuk dukungan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto adalah pengeluaran untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh semua lini termasuk pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan. Hasil dari PDRB dihitung dalam kurun waktu yang telah ditetapkan seperti per tri wulan ataupun per tahun. Jika APBD adalah rancangan awal pemerintah daerah melakukan penganggaran dana untuk pertahunnya, maka PDRB hadir untuk memperhitungkan nilai atau hasil dari penggunaan dana daerah walaupun tidak secara menyeluruh namun PDRB sangat penting dalam mengetahui sejauh mana pertumbuhan ekonomi di NTB dapat berjalan selama satu tahun berjalan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu dari (Mafahir & Soelistiyo, 2017) dimana adanya kesamaan tempat dan metode dalam penelitian. Namun perbedaan penelitian tersebut berada pada keterbaharuan waktu, teori dan perbedaan variabel dari penelitian sebelumnya. APBD adalah regulasi kebijakan oleh pemerintah untuk rencana pertumbuhan ekonomi di NTB dalam satu tahunan dan produk domestik regional bruto adalah dampak atau hasil dari regulasi yang dirancang. Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui apakah

permasalahan ekonomi yang terjadi di Provinsi NTB adalah karena belum tepatnya regulasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah atau berada pada kesadaran masyarakat yang ada didalamnya. Mengacu pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di NTB yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2022**”. Harapannya dari penelitian ini menjadi penting untuk memberikan informasi dan rekomendasi bagi pemerintah untuk pengelolaan anggaran selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada hasil latar belakang penjelasan diatas, untuk dapat mengetahui mengenai pengaruh komponen-komponen APBD untuk pertumbuhan ekonomi (PDRB). Dengan demikian, rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Apakah APBD efektif atau tidak di Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana pengaruh APBD terhadap PDRB Nusa Tenggara Barat?

1.3 Pembatasan Masalah

Merujuk pada UU No. 32 dan 33 tahun 2004 mengenai hak pengaturan daerah oleh pemerintah daerah baik dalam mengatur kebijakan dan keuangan daerah sebagaimana fungsinya. Sehingga penelitian ini hanya akan berfokuskan untuk menganalisis efektivitas APBD di Provinsi NTB dan pengaruh APBD melalui pendekatan (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Daerah) terhadap PDRB NTB tahun 2017-2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui APBD efektif atau tidak di Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh APBD terhadap PDRB di Nusa Tenggara Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, manfaat yang diharapkan dari menganalisis efektivitas pengelolaan

anggaran di Provinsi NTB pada tahun 2017-2022 sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pertimbangan mengenai efektivitas pengelolaan anggaran di Nusa Tenggara Barat.

b. Manfaat Praktisi

1. Pemerintah, sebagai bentuk informasi dan pertimbangan dalam pengelolaan anggaran dana untuk kedepannya di Nusa Tenggara Barat.
2. Penulis, sebagai bahan penambah wawasan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini juga menjadi pengalaman yang menarik dan berharga bagi peneliti untuk memahami bagaimana kerja keuangan dalam suatu wilayah terutama di Provinsi NTB. Penelitian ini juga menjadi bentuk tanggungjawab peneliti dalam menyelesaikan studi di jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

